

MANAJEMEN PEMBIAYAAN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN TAHFIZUL QURAN IMAM ASY-SYAATIBI BANTOABADDO GOWA

Zusba Muctar

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
zusba@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang manajemen pembiayaan operasional pondok pesantren tahfuzul Quran imam Asy-Syaatibi bantuabaddo gowa. Pihak pengelola pesantren sudah melaksanakan manajemen pembiayaan operasional pesantren dengan baik berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan meski model manajemen masih sangat tradisional namun pesantren ini mampu menghasilkan dana terisita yang cukup untuk digunakan pada pembiayaan tahun anggaran berikutnya. Dengan minimnya bantuan dana pemerintah, dan transparansi sisa anggaran, pesantren ini justru mendapat tempat yang baik di tengah-tengah masyarakat hingga tahun demi tahunnya pesantren ini kian bertambah jumlah santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis terhadap data yang sudah tersedia dalam bentuk angka dan bukan pada hitungan. Disamping data ditelaah dalam bentuk dokumen juga data analisis dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan manajemen pembiayaan operasional pesantren ini ada pada konsistensi terhadap acuan rencana anggaran pendapatan dan belanja juga transparansi pengelolaan dan sisa anggaran kepada pihak-pihak terkait. Adapun penghambat dari manajemen pembiayaan pesantren tidak beda jauh dengan hambatan-hambatan yang ada pada Lembaga Pendidikan swasta pada umumnya, yakni kurangnya bantuan dana dari pemerintah hingga ini juga berdampak pada moral dan spekulasi masyarakat pada umumnya.

Keywords: Manajemen, Pondok Pesantren, Pembiayaan, Operasional

PENDAHULUAN

Biaya pendidikan adalah salah satu elemen atau unsur terpenting dalam suatu lembaga pendidikan, baik itu sekolah-sekolah yg dikelola oleh negara (sekolah negeri) atau sekolah-sekolah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat atau lembaga tertentu. Biaya-biaya pendidikan yang ada haruslah dikelola dengan baik guna menopang operasional pendidikan yang mencakup program-program sekolah agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Manajemen pembiayaan operasional yang baik akan membawa dampak yg baik, juga kepuasan dari konsumen baik itu konsumen external meliputi siswa, guru, staf dan para karyawan akademik yg terlibat secara langsung ataupun konsumen external seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintahan. Namun sebaliknya, jika manajemen pembiayaan operasional suatu lembaga pendidikan

kurang baik maka akan berdampak kurang baik sehingga program-program pendidikan tidak akan bisa dijalankan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya tidak akan mampu menghasilkan generasi-generasi yang bermutu sebagaimana yang diamanahkan oleh negara.

Untuk mewujudkan sekolah yang baik diperlukan optimalisasi manajemen pembiayaan sekolah yang harus tepat guna, dengan kata lain manajemen pembiayaan keuangan sekolah adalah sentral dari terlaksananya program-program pendidikan. Apakah lagi sekolah - sekolah Islam, pesantren yang alokasi anggaran Untuk mewujudkan sekolah yang baik diperlukan optimalisasi manajemen pembiayaan sekolah yang harus tepat guna, dengan kata lain manajemen pembiayaan keuangan sekolah adalah sentral dari terlaksananya program-program pendidikan. Apakah lagi sekolah - sekolah Islam, pesantren yang alokasi anggaran dari pemerintah sangat minim jika dibandingkan dengan sekolah umum. Bahkan disebut-sebut bahwa anggaran yang di berikan hanya atas Belasi kasih pendidikan umum. Pemerintah dalam memberikan anggaran dana pada pendidikan madrasah (Depag) sangatlah kecil dibandingkan dana yang diberikan pada Dinas pendidikan (Diknas), padahal dana yang sedemikian kecil itu oleh departemen agama tidak hanya digunakan pada aspek pendidikan saja, melainkan dibagi-bagi untuk kebutuhan selain pendidikan (madrasah).

Sebenarnya, pembiayaan pendidikan telah di atur oleh pemerintah dan menjadi tanggungjawab Negara. UU negara tahun 1945 amandemen IV yang menyatakan bahwa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pembiayaan dan keuangan sangat berpengaruh secara langsung dalam menunjang pengelolaan Pendidikan, dengan kata lain keuangan sangat menentukan efisiensi dan efektifitas Pendidikan. Manajemen keuangan dan pembiayaan adalah bagaian dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Manajemen Berbasis Sekolah selalu menuntut kemampuan pengelolaan sekolah dalam merencanakan, menjalankan juga mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan dana secara terbuka dan transparan kepada warga masyarakat dan pemerintah. Merencanakan anggaran tidak hanya memaparkan kebutuhan keuangan Lembaga atau pesantren dalam jumlah angka, namun mencakup di dalamnya strategi “mencetak uang”. Hal ini dimaksudkan agar sekolah atau pesantren tidak hanya menjadi “peminta-minta”, tetapi sekaligus menjadi sumber keuangan yang mandiri.

Pembiayaan dan keuangan adalah dua potensi yang sangat menentukan, juga merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan. Dalam kajian Manajemen Pendidikan komponen keuangan adalah komponen produksi yang menentukan berjalannya kegiatan belajar mengajar bahkan operasional sekolah secara umum, hingga keuangan dan pembiayaan ini haruslah dikelola dan di atur sedemikian rupa hingga menunjang operasional sekolah demi terwujudnya tujuan pendidikan. Ini merupakan keuangan sekolah untuk mencari juga memanfaatkan berbagai sumber-sumber dana. Partisipasi

masyarakat dalam dunia Pendidikan baik sebagai penyandang dana atau hal hal lain terkait pengembangan mutu sekolah sudah menjadi hal biasa karena memang masyarakat adalah satu dari tiga komponen yang perlu dimintai partisipasi dan kerjasamanya, tiga komponen yang tak terpisahkan pada pengembangan sekolah adalah kerjasama antara sekolah, antar wali murid dan masyarakat sekitar.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dasar Manajemen Keuangan Pendidikan

Dalam dunia pendidikan pengelolaan keuangan merupakan suatu proses pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan sekolah. Pengendalian keuangan terhadap kegiatan biasanya dilakukan oleh manajer dalam hal ini adalah oleh ketua pengurus dan bendahara dan atau kepala sekolah bersama bendahara sekolah pada sektor lembaga pendidikan formal yang ada di bawah naungan institusi. Manajemen keuangan pondok pesantren juga adalah suatu usaha atau proses dalam pengaturan aktivitas kegiatan yang ada di pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang formal yang didalamnya termasuk kegiatan *planning* analisis dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan keuangan. Mengelola keuangan pesantren merupakan aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efektif dan efisien. Upaya tersebut bisa berupa pengembangan usaha pesantren, keputusan untuk berinvestasi dan pengelolaan keuangan lainnya yang dilakukan secara syar'i sesuai fiqih muamalat dalam Islam.

Fungsi manajemen keuangan dalam pondok pesantren adalah untuk memudahkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban agar tercapainya suatu tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi ini secara umum adalah rumusan yang sama dan juga berlaku secara umum untuk semua fungsi manajemen. Pengelolaan keuangan pondok pesantren memiliki 3 fungsi yaitu:

1. Menetapkan pengalokasian dana. Fungsi ini merupakan keputusan yang diambil oleh pemilik kebijakan keuangan pondok pesantren dalam hal ini adalah ketua pengurus dan lembaga institusi yang berada dibawah naungan pondok pesantren seperti kepala madrasah dan lembaga-lembaga lain yang berada di bawah naungan Pesantren tentang pengalokasian keuangan masing-masing divisi yang berada di bawah pesantren yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dari aktiva aktiva madrasah dan lembaga lain yang berada di pesantren serta pengaruh struktur keuangan yang dimiliki yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aset tetap atau aktiva tetap.
2. Memutuskan alternatif pembiayaan. Keputusan ini diambil oleh manajer atau ketua pengurus atau ketua divisi divisi lembaga yang berada dibawah naungan pondok pesantren untuk melakukan pertimbangan serta analisis antara sumber-

sumber dana yang paling ekonomis bagi lembaga atau pesantren untuk mendanai kebutuhan investasi serta mendanai segala macam kegiatan operasional pondok pesantren. Keputusan pembiayaan akan tercermin pada sisi untung dan rugi bagi pondok pesantren dan lembaga-lembaga yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren Dan ini secara langsung akan mempengaruhi pola keuangan dan struktur modal.

3. Kebijakan pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan yang dimaksudkan adalah pembagian keuntungan yang diperoleh dari lembaga atau pondok pesantren atau divisi-divisi yang ada di bawah pondok pesantren. Keputusan pembagian keuntungan atau laba adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan diberikan oleh lembaga formal di bawah pondok pesantren atau divisi-divisi formal di bawah pondok pesantren kepada lembaga formal atau kepada pondok, juga keputusan untuk menahan sebagian laba atau keuntungan untuk pengembangan kegiatan operasional tiap-tiap divisi. Kebijakan ini juga akan berpengaruh secara langsung terhadap struktur keuangan dan terhadap struktur modal.

Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan

Pengelola lembaga pendidikan ataupun pesantren harus memahami mekanisme aturan penggunaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan lembaga serta sistematika dan pelaporan juga pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan lembaga pendidikan kata pesantren harus mengetahui prinsip-prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan formal yang tertuang pada undang-undang nomor 20 tahun 2003. Pada pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan efisiensi transparansi dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan pengarahannya dan penekanan.

Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menunjukkan adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen atau pengelolaan berarti menuntut adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Jika dijabarkan ke dalam pengelolaan pondok pesantren transparansi yang dimaksud berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan Pondok yaitu keterbukaan sumber keuangan beserta jumlahnya kemudian rinciannya dan penggunaan serta pertanggungjawaban yang harus jelas hingga dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip keterbukaan dalam mengelola keuangan sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan orang tua wali serta masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program-program pendidikan pondok pesantren.

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip dimana seseorang dinilai baik oleh orang lain karena kualitas kerja dan loyalitas terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren adalah bagaimana pengelolaan keuangan pondok pesantren dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama maka pihak pengelola pesantren dan lembaga formal lainnya yang berada dibawah naungan pondok pesantren membelanjakan dana secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pembelanjaan dana lembaga dapat dilakukan kepada pimpinan pondok atau Badan Pemeriksa Keuangan pesantren atau orang tua wali, masyarakat dan pemerintah.

Diperlukan tiga pilar utama dalam prinsip akuntabilitas yaitu:

1. Kesadaran Transparansi para penyelenggara sekolah atau pondok pesantren dengan menerima saran-saran dan masukan dan juga turut mengikutsertakan berbagai pihak dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah atau pesantren.
2. Kesadaran akan standar kinerja yang dapat diukur dari para pengelola dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya.
3. Kesadaran untuk berpartisipasi guna menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan prosedur-prosedur yang mudah dimengerti relatif murah.

Prinsip Efektivitas

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah tepat guna atau mempunyai manfaat yang efektif. Efektivitas adalah bisa dilihat ketika pencapaian-pencapaian visi pada suatu lembaga telah tercapai. Manajemen keuangan pondok pesantren bisa dikatakan telah memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dapat mengatur keuangan dan pembiayaan aktivitas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pondok pesantren sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Prinsip Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efisiensi adalah menghasilkan sesuatu tanpa menguras tenaga. Dengan kata lain efisiensi adalah lebih mengarah pada ketepatan waktu atau kuantitas dalam suatu kegiatan. Efisiensi bisa dilihat dari input dan output atau antara daya dan hasil yang diperoleh. Daya yang dimaksudkan adalah berupa Tenaga pikiran waktu dan biaya. Sesuatu dapat dikatakan berjalan dengan efisien apabila penggunaan waktu dan tenaga serta biaya relatif kecil penggunaannya dan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan. Bisa juga dikatakan efisiensi adalah

penggunaan waktu tenaga dan biaya tertentu yang sekecil-kecilnya namun memberikan hasil sebanyak-banyaknya.

Manajemen Pembiayaan Operasional

Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga bisa diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Manajemen dikatakan ilmu karena dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistemik berusaha memahami tentang mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. Dinamakan kiat karena manajemen mengatur dan mencapai sasaran dengan menggunakan tangan orang lain. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu profesi, manajer dan para profesional.

Hambatan Manajemen Pembiayaan Operasional Pesantren dan Solusinya

Dalam mengelola keuangan pondok sekolah atau pondok pesantren ada beberapa hambatan yang wajib diketahui oleh seorang manajer atau kepala pengasuh pondok. Pengelolaan keuangan yang kurang tepat bisa berakibat fatal bagi kelangsungan lembaga, sekolah, atau pondok pesantren. Bahkan tidak jarang terjadi saling mencurigai, saling menyalahkan bahkan tidak jarang berakhir pada ranah hukum. Berikut kami sebutkan faktor penghambat, adapun solusi adalah sisi yang berlawanan dari faktor penghambat. Kegagalan dalam pengelolaan pada umumnya disebabkan hal-hal berikut:

a. Faktor Internal

1). Tidak Memiliki Akuntan yang Professional,

Sebagaimana yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar biasanya Perusahaan atau lembaga dapat lebih fokus mengelola keuangannya jika pada lembaga atau perusahaan tersebut didampingi oleh akuntan yang profesional. Dengan tidak adanya keahlian dalam masalah keuangan kemungkinan besar Manager akan melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan menyangkut kebijakan pengeluaran dan pembelajaran anggaran. Sedangkan jika suatu lembaga atau sekolah atau pesantren memiliki tenaga akuntan yang profesional dalam menangani keuangan maka mereka dapat membantu lembaga atau perusahaan atau pondok pesantren dalam hal meningkatkan arus kas dan pos-pos bisnis atau kewirausahaan dalam lembaga atau pondok pesantren tersebut. Hingga dapat membantu untuk mengambil keputusan yang tepat dengan melihat laporan keuangan yang telah dibuat. Hingga tidak jarang pada perusahaan-perusahaan

besar yang merasa terbebani untuk masalah keuangan mereka memperkerjakan atau menyewa jasa akuntan.

2). Kurang Memahami Kegunaan Kas

Setiap lembaga baik itu sekolah maupun pesantren haruslah mempunyai arus kas atau dana simpanan kas. Untuk mengelola dana simpanan kas dengan baik maka pastikan manajer atau pimpinan pondok memiliki prosedur yang ketat dalam pembelanjaan kebutuhan sekolah atau pesantren. Pada tahapan ini biasanya pembelanjaan ataupun pengeluaran terhadap kebutuhan lembaga tidak mesti berpijak pada rencana anggaran belanja pondok pesantren Tetapi lebih melihat realita ketersediaan dana atau dengan kata lain seorang manajer harus pandai melihat kebutuhan dari keperluan.

3). Tidak Memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Membelanjaan.

Sebagaimana perusahaan-perusahaan besar maka lembaga pendidikan ataupun pondok Pesantren pun harus mempunyai rencana pembelanjaan dan penganggaran operasional. Dengan merencanakan anggaran pendapatan dan pembelanjaan maka lebih mudah untuk mengelola dan menjaga keuangan. Dari rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran inilah kemudian akan dibuatkan laporan keuangan yang jelas dan akurat sehingga dapat menghindari terjadinya risiko kerugian ataupun suasana saling curiga di antara pengelola lembaga.

4). Tidak Memisahkan Keuangan Lembaga dan Keuangan Pribadi

Kebiasaan mencampur adukkan keuangan lembaga keuangan pribadi sering dilakukan pada lembaga atau perusahaan pemula, dengan mencampur adukkan aset pribadi dengan aset lembaga dapat membuat tas lembaga menjadi berantakan. Bahkan dengan mencampur keuangan pribadi dengan keuangan lembaga sangat berisiko membuat kerancuan dalam pembukuan dan pelaporan. Dan jika ini terus dibiarkan akan sangat berdampak pada perkembangan pengelolaan keuangan lembaga dan tidak jarang membawa kerugian bagi yang memiliki aset pribadi dalam hal ini pinang pondok pesantren atau mereka yang berwenang.

b. Faktor Eksternal

Adapun hambatan pembiayaan operasional yang berasal dari luar (Eksternal) lembaga pada umumnya disebabkan keterbatasan perolehan dana, hal ini juga biasa disebabkan karna kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga atau keterbatasan anggaran Pendidikan daerah. Keterbatasan anggaran Pendidikan daerah diakibatkan karna pemerintah daerah membebaskan sepenuhnya anggaran Pendidikan pada pusat atau karna lemahnya daerah dalam mengembangkan program-program Pendidikan, atau faktor lain misalnya penyimpangan dana Pendidikan. Kesemuanya ini adalah faktor eksternal yang berpengaruh terhadap

manajemen pembiayaan Pendidikan. Adapun solusi terhadap faktor eksternal adalah pemerintah daerah harus membuat rencana anggaran Pendidikan daerah dan pengalokasiannya. Dengan demikian anggaran pembiayaan Pendidikan di daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya mengharapakan APBN. Disamping itu juga harus ada sanksi yang tegas atas pelaku penyimpangan anggaran Pendidikan.

Solusi Manajerial Keuangan Pondok Pesantren

Pendidikan pondok pesantren juga merupakan sebuah lembaga pendidikan non formal yang juga ikut berperan besar dalam mencerdaskan bangsa. Dalam lembaga tersebut juga tidak terlepas dari pembiayaan atau pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan tersebut, juga tidak lepas dari anggaran yang memuat pembagian penerimaan dan pengeluaran, anggaran rutin dan anggaran pembangunan dan anggaran insidental.

Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.
3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya.
4. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakekatnya merupakan penelitian untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi pada suatu saat di tengah obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana masalah yang diteliti berupa kajian deskriptif analitik yang bersifat fenomenologis interpretatif. Pada prinsipnya kajian fenomenologis-interpretatif dalam penelitian kualitatif merupakan ukuran-ukuran untuk memilih masalah-masalah dan data-data yang berkaitan satu sama lainnya.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berimplikasi pada penggunaan fenomena kualitatif yang mekanismenya secara konsisten dilakukan dari mulai pengolahan data sampai dengan membuat kesimpulan tidak menggunakan perhitungan ataupun pengolahan secara matematis dan statistik, sekalipun data yang diperoleh sudah dalam bentuk statistic dan hitungan, namun peneliti lebih menekankan pada kajian interpretative atau analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode fenomenologis didasarkan pada falsafah fenomenologi, dimana peneliti berupaya merumuskan suatu pertanyaan yang kemudian dianalisis berdasarkan pada pertanyaan

“persepsi” partisipan mengenai fenomena yang sedang diteliti. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminta partisipan untuk mengungkapkan persepsi mereka tentang fenomena. Pada penelitian ini peneliti menggali data tentang manajemen pembiayaan operasional di Pesantren tahfizul Quran imam Asy-Syatibi bantoabaddo Gowa, mulai dari perencanaan, strategi pengumpulan biaya, pengelolaan biaya, laporan keuangan serta faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat manajemen pembiayaan operasional di pesantren tersebut.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pesantren tahfizul Quran imam Asy-Syatibi bantoabaddo Gowa, walaupun baru tetapi kemajuan Pesantren tahfizul Quran imam Asy-Syatibi bantoabaddo Gowa cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana. Pesantren tahfizul Quran imam Asy-Syatibi bantoabaddo Gowa ini bertempat diatas area 1Ha, adalah lembaga pendidikan dalam naungan Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Makassar yang memiliki pendidikan formal tingkat MA. Keadaan pengajar dan karyawan sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Keadaan pengajar dan karyawan di Pesantren tahfizul Quran imam Asy-Syatibi bantoabaddo Gowa sealigus para pengganti orang tua santri yang banya menghabiskan waktu bersama santri.

Jenis penelitian tersebut insya Allah akan menemukan berbagai deskripsi tentang manajemen pembiayaan operasional Pesantren tahfizul Quran imam Asy-Syatibi bantoabaddo Gowa. Untuk mencapai hal tersebut, maka lebih awal penelitian ini memberikan gambaran umum Pesantren tahfizul Quran imam Asy-Syatibi bantoabaddo Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (diobservasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa.

a. Sistem *Budgeting*

Penganggaran (*budgeting*) bagi sebuah lembaga merupakan sebuah keniscayaan yang semestinya dipersiapkan sehingga tujuan dan program pesantren pada tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah dan memperlancar segala program yang akan dilaksanakan. Penganggaran di Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa menunjukkan bahwa dalam setiap penentuan alokasi anggaran, terlebih dahulu memperhitungkan dan menerapkan:

1) Inventarisasi sumber dana.

Dalam menginventarisir sumber dana dibedakan menurut jenis sumber dananya, yaitu sumber dana pemerintah, sumber dana orang tua santri dan masyarakat

(melalui wadah komite), serta bantuan lainnya yang tidak mengikat tetapi sah. Akan tetapi peneliti melihat dari susunan Laporan Keuangan tahun ini, belum ada sama sekali bantuan dari pemerintah yang masuk, baik itu dana Bos atau dana lainnya yang bersumber dari pemerintah. Dengan keseluruhan dana yang terkumpul, maka alokasi penganggaran dipilah menjadi dua kelompok utama, yaitu Pembiayaan kebutuhan personalia dan kebutuhan pembiayaan non personalia. Sumber dana yang berasal dari masyarakat diluar komite lebih banyak dialokasikan pada pembangunan, adapun dana dari orantua santri melalui dana komite diperuntukkan untuk pembiayaan peronalia dan non personalia.

2) Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sebagai dasar dalam menentukan skala prioritas, Pesantren pesantren ini menggunakan komponen:

- a. Santri, yakni penganggaran alokasi berdasar pada banyaknya santri yang terdaftar. Dengan menguunakan subsidi silang bagi santri yang kurang mampu. Perhitungan santri ini direkap pada awal tahun ajaran, pertengahan, atau akhir tahun pelajaran.
- b. Pengajar, yaitu penganggaran alokasi dana atas belanja pegawai dan
- c. Ruang Belajar, merupakan jenis penganggaran berupa fisik (baik perawatan ringan, sedang, berat, dan pembangunan).

Sedangkan pola yang digunakan sebagai pedoman menentukan skala prioritas meliputi:

- a. Memeriksa, merumuskan, dan menjabarkan permasalahan.
- b. Menyusun kriteria untuk melakukan seleksi prioritas.
- c. Mengidentifikasi alternatif kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.
- d. Mengevaluasi alternatif kebijaksanaan.
- e. Menyusun prioritas kebijaksanaan.

Elemen di atas, diterapkan dalam pelaksanaan sistem manajemen keuangan, terlihat dari upayanya yang membuat perencanaan keuangan pesantren dengan dibukukannya Rencana Anggaran dan Pendapatan Pesantren (RAPBP). Langkah ideal tersebut merupakan rangkaian manajemen keuangan yang tidak lain adalah dalam rangka menjadikan keuangan pesntren lebih tertata dan mempermudah bagi realisasi anggaran keuangan pada tahun anggaran.

Budgeting juga akan turut serta menentukan hasil akhir dari realisasi keuangan pesantren. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan di atas, bahwa dari keadaan keuangan di Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa menunjukkan keteraturan pengeluarannya. Bahkan dari hasil akhir realisasi anggaran yang direncanakan, menunjukkan bahwa pesantren tersebut memiliki saldo

kas akhir yang dapat dipergunakan sebagai modal awal bagi pelaksanaan program di tahun anggaran selanjutnya.

Pada Pesantren Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa terlihat memiliki kelebihan anggaran sebesar yaitu sebesar Rp 197.380.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Hal ini berarti bahwa, pentingnya perencanaan dan realisasi anggaran bagi pesantren bukanlah sebuah kelengkapan administrasi semata, melainkan pelaksanaan dan penerapan yang seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadikan lembaga pesantren itu tertata dan tersistem pola keuangannya.

Anggaran yang ditetapkan di tahun 2018 tersebut menunjukkan keterlibatan orang tua santri dan pihak lain yang tidak mengikat. Hal ini diterapkan dalam rangka melatih tanggung jawab orang tua santri yang berkewajiban baik secara agama maupun sebagai warga negara menjamin kelangsungan anak-anaknya mengenyam pendidikan. Dengan diberlakukannya sistem *budgeting* di Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa berarti pula bahwa tingkat ketidak-teraturan pengeluaran keuangan semakin minim. Dan keterlibatan pihak di luar pesantren (baik melalui komite maupun pihak lain yang tidak mengikat), akan semakin mampu mendorong keberlangsungan kemajuan pesantren dalam pembelajaran maupun lainnya.

Dengan penganggaran yang demikian, menunjukkan bahwa Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa, dalam melaksanakan sistem manajemen keuangannya telah terlebih dahulu mempersiapkan diri bidang-bidang mana keuangan nantinya akan diperoleh dan dibelanjakan. Hal ini atas hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya yang memberikan rekomendasi penganggaran tahun selanjutnya.

b. Sistem *Accounting*

Pembukuan keuangan ini nampak dari hasil penelitian penulis, yang menunjukkan bahwa, pesantren ini telah menerapkan sistem manajemen keuangan dengan adanya pembukuan keuangan baik dari rencana penaganggaran sampai dengan pembukuan hasil penggunaan dan pengawaasan. Pesantren tersebut mampu melaksanakan pembukuan keuangan dengan rapi dan akurat. Hal ini tentu tidak lepas dari keterampilan dan kedisiplinan para pengelola yang mengampu bidang keuangan (bendahara). Selain itu, daya dukung para tenaga pendidik dan kependidikan lainnya juga turut serta mendukung jalannya sistem pembukuan yang rapi dan teratur.

Para tenaga bidang keuangan ini, tentunya tidak hanya mengelola bagian keuangan yang bersumber dari pemerintah, melainkan juga segala bentuk sumber dana yang masuk dari orang tua santri/ komite serta masukkan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Segala pengeluaran disesuaikan dan dibukukan dengan rapi dan sistematis, sehingga para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pihak diluar

pesantren (pemerintah juga masyarakat umum) dapat melihat dan mengetahui secara jelas segala keuangan baik yang masuk maupun yang dibelanjakan oleh pesantren.

Secara terperinci, pembukuan atas sumber dana yang masuk dari orang tua santri dibukukan dalam fail dan data yang kemudian tiap-tiap pendapatan dari sumber ini diprint out sebagai hasil kerja transparan yang dipresentasikan pada akhir tahun anggaran. Selain sumber dana dan perbelanjaan oleh pesantren dibukukan dalam buku bendahara, pihak Pesantren pesantren ini juga memberikan bukti belanja (nota atau kuitansi). Hal ini semakin memberikan gambaran jelas, bahwa pesantren tersebut tidak semata-mata hanya menggali sumber dana dan perbelanjaannya saja, melainkan juga bertanggungjawab kepada semua pihak yang diwujudkan dengan sistem administrasi keuangan yang akurat (dibuktikan dengan nota atau kuitansi tersebut).

Secara teknis, yang dilaksanakan oleh Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa dalam rangka lebih menata pembukuan keuangannya disusunlah langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan

Sebagai langkah awal dalam menentukan pembukuan yang sistematis, maka pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan ini meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mengukur data keuangan, yakni mencatat segala bentuk transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis selama satu periode dalam buku jurnal. Dan satuan pengukurannya yang digunakan adalah satuan mata uang.
- b. Memproses data keuangan, yaitu pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran. Kegiatan ini adalah pencatatan transaksi seluruh data dikumpulkan secara kronologis kemudian digolongkan kedalam kategorinya dan disajikan secara ringkas.
- c. Pelaporan data keuangan, merupakan suatu kegiatan pesantren dilakukan secara berkala dan sistematis kepada pihak internal dan eksternal yang terkait langsung dengan pesantren. Diantaranya pelaporan kepada dewan pengajar, komite.

2) Pembukuan pelaksanaan anggaran

Sebagaimana digambarkan di atas, bahwa dalam kegiatan pembukuan keuangan pesantren tidak terikat pada acuan pembukuan tertentu, Pesantren ini juga memiliki pembukuan tersendiri, seperti buku yang mencatat pemasukan dan pengeluaran dari orang tua santri, komite, dan masyarakat atau pihak lain yang tidak mengikat.

c. Sistem *Auditing*

Pelaksanaan pengukuran hasil kerja (*auditing*) pada Pesantren Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo dilaksanakan setelah seluruh penggunaan keuangan tiap-tiap bidang yang ditentukan secara berkala dilaporkan kepada bendahara pesantren. Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, setiap pengeluaran baik yang diperuntukkan post internal maupun post eksternal dilaporkan kepada bendahara, kemudian bendahara melakukan pendataan seluruh pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran berupa nota atau kuitansi dari para pengguna anggaran. Langkah selanjutnya, bendahara memasukkan seluruh pengeluaran tersebut dalam buku kas umum, yang juga akan dibantu dengan bukti transaksi seperti nota dan kuitansi yang telah diterima bendahara disesuaikan dengan prosedur pemerintah; yakni dengan memberikan bubuh tanda tangan dan stempel yang diperlukan. Bagian yang tidak ditinggalkan oleh Pesantren ini adalah dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti keterlibatan pengawasan yang secara langsung melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Secara rinci pengawasan dari ketiganya adalah:

1) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kela pesantren.

Pengawasan ini dilakukan oleh kelada pesantren yg secara struktural disebut direktur. Pengawasan ini dilakukan dengan berkala dan berkesinambungan kepada bendahara pesantren. Tujuannya tidak lain membantu pengawasan keuangan pesantren agar tidak terjadi ketidak-sesuaian penggunaan keuangan yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya. Pengawasan kepala pesantren tersebut tidak hanya yang bersifat penggunaan internal saja melainkan penggunaan keuangan yang bersifat eksternal, seperti penggunaan yang tidak teranggarkan pada rancangan awal. Dan juga pengawasan ini berupaya membantu bendahara dengan mempersiapkan bukti- bukti keuangan yang membutuhkan legalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan anggaran. Meski demikian, bukan berarti bendahara melepaskan diri dari pengawasannya oleh karena sifat dari pengawasan yang dilakukan kepala pesantren hanyalah sebagai pengawas yang bertujuan untuk memastikan pos penggunaan anggaran yang telah dirancang tidak melenceng dan terlaksana dengan maksimal. Prinsip pelaksanaan pengawasan ini tergambar sebagai berikut:

- a. Dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.
- b. Dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan, juga kegiatan strategis.
- c. Dilaksanakan secara komprehensif, cepat, tepat, tertib, dan didasarkan pada penilaian yang objektif.
- d. Berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak bertindak subjektif.
- e. Pencatatan dan pelaporan yang faktual, rasional, dan tepat waktu untuk mendeteksi penyimpangan

- f. Orientasinya adalah masa sekarang dan masa mendatang
- g. Sifatnya edukatif atau pembinaan meskipun terjadi penyimpangan dan kesalahan
- h. Melakukan pencegahan secara tuntas pada setiap kesalahan atau penyimpangan.

2) Pengawasan fungsional; yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah (baik dinas pendidikan maupun kementerian agama).

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan dengan menyesuaikan program monitoring, pendampingan dan pelaporan dari pihak dinas terkait. Baik untuk penggunaan keuangan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental; baik yang dipergunakan dalam kurun waktu panjang maupun penggunaan anggaran yang dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini diketahui dari hasil wawancara bersama bendahara umum pesantren.

3) Pengawasan masyarakat adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat (orang tua santri, komite pesantren, yayasan, masyarakat).

Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa telah memberlakukan pengawasan oleh masyarakat. Pada pengawasan ini, masyarakat secara komulatif mengakomodir bentuk-bentuk pengawasan sesuai bidang kegiatan yang berlaku saat itu. Daya dukung dari masyarakat inilah yang oleh Pesantren dimanfaatkan, terutama dalam rangka memberikan pengawasan keuangan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan kepala sekolah pesantren. Pihak pesantren secara terbuka menginformasikan seluruh keuangan yang diperoleh, dengan papan tabulasi keuangan tersebut kepada seluruh masyarakat terutama komite dan orang tua santri yang dapat melihat dan memberikan pengawasan dan saran demi lancarnya program penganggaran pesantren, baik kegiatan rutin maupun untuk kegiatan insidental. Demikian halnya, jika dianggap atau bahkan terjadi penyelewengan oleh pihak pesantren, maka masyarakat dapat untuk segera mengingatkan dan atau bahkan melaporkannya kepada pihak terkait serta kepada aparat hukum.

Keterlibatan yang demikian juga diawali dari pengawasan yang bersifat internal, seperti oleh masyarakat dikomunikasikan dengan pihak yayasan yang membawahi langsung keberadaan Pesantren pesantren tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa.

Suatu pesantren dikatakan berhasil manakala pesantren tersebut mampu mengembangkan dan mengedepankan aspek-aspek yang menunjang pembangunan. Seperti bagaimana infrastruktur dari pesantren tersebut dibangun, supervisi pendidikan, hubungan pesantren dengan masyarakat, sistem informasi yang dikelola,

dan pengelolaan keuangan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung eksistensi Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa yang mendukung berlakunya sistem manajemen keuangan pesantren khususnya, yang diharapkan dapat mendukung kemajuan kualitas/mutu pesantren, antara lain adalah:

- 1) Pesantren menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan.
- 2) Adanya pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional pesantren yang mengatur:
 - a) Sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola.
 - b) Penyusunan dan pencarian anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional.
 - c) Kewenangan dan tanggung jawab kepala pesantren dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
 - d) Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite pesantren dan institusi di atasnya.
- 3) Adanya sosialisasi pedoman pengelolaan dan operasional pesantren disosialisasikan kepada seluruh warga pesantren dan orang tua/wali santri untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan, dalam pertemuan antara kepala pesantren, pengajar, komite sekolah, dan orang tua/wali santri yang diadakan minimal dua kali dalam satu tahun.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Manajemen Keuangan Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa

- a. Kurangnya bantuan dana dari pemerintah. Dengan kurangnya bantuan dan dari pemerintah paling tidak berdampak pada moral pengelola pesantren. Karena tidak dapat dipungkiri, bantuan dari pemerintah bukan hanya menjadi penopang dalam pembiayaan suatu lembaga, lebih dari itu menunjukkan adanya kerja sama dan hubungan baik serta kepercayaan pemerintah terhadap suatu Lembaga, apakah lagi Lembaga Pendidikan yang menjalankan amanat undang undang yakni turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Praktik manajemen di pesantren sering menggunakan model manajemen tradisional. Dominasi senioritas jelas mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreatifitas dan inovasi dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior meki tidak selamanya demikian. Namun kondisi ini mengarah pada penilaian

negatif, sehingga muncul kesan bahwa meluruskan atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap sebagai sikap su'al- adab.

- c. Anggapan demikian, sebenarnya, merupakan pengaruh budaya lokal, bukan pengaruh ajaran agama. Islam memang mengajarkan kode etik dalam pergaulan antara orang tua dan muda. Kalangan muda menghormati yang tua sedangkan yang tua mengasihi yang muda. Penghormatan yang berlebihan pada senior justru menimbulkan dua macam kelemahan: pertama, kalangan senior tidak merasa tertantang sehingga kreatifitasnya tidak terbangkitkan sama sekali, dan Pesantren, kalangan junior merasa ide, kreatifitas, gagasan, inisiatifnya terbelenggu, sehingga merasa pesimis dalam menghadapi tantangan- tantangan lembaga pendidikan di masa depan yang semakin kompleks.
- d. Selanjutnya, kondisi kultur di luar pesantren juga mempengaruhi kualitas pesantren. Kondisi ini bisa berupa pandangan atau penilaian masyarakat terhadap pesantren. Selama ini pesantren dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan kelas ekonomi, tidak bermutu, hanya mengajarkan agama semata, jurusan akhirat, tempat penampungan anak-anak orang miskin dan tidak bisa melanjutkan ke sekolah tersebut merupakan hal yang salah kaprah karena tidak berdasar. Meskipun demikian, anggapan itu tetap bertahan mempengaruhi masyarakat umum yang selama ini memang jauh dari kehidupan pesantren. Mereka terpengaruh lantaran tidak mengetahui realitas yang sebenarnya. Tentu saja, kondisi eksternal pesantren yang demikian kurang menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan pesantren.
- e. Secara ekonomi, pada umumnya posisi mereka juga berada pada kelas menengah ke bawah meski tidak semuanya demikian. Begitu juga secara sosial, mereka berasal dari kalangan masyarakat biasa. Intinya, potensi santri pesantren merupakan akumulasi kelas menengah ke bawah dari segi ekonomi. Keadaan ini menunjukkan bahwa kehadiran mereka di pesantren telah membawa sejumlah problem yang harus diselesaikan karena ini juga berpengaruh pada kelangsungan pembelajaran.
- f. Selanjutnya, dibandingkan sekolah umum, pengajar, sarana dan prasarana, serta peralatan pembelajaran di pesantren juga masih tertinggal dalam pengalaman mengajar serta usia. Pengajar-pengajar di pesantren sekalipun memiliki profesional yang tinggi namun terkadang tidak didukung dengan sarana pembelajaran yang memadai, apakah lagi para pengajar masih tergolong muda dari usia dan pengalaman mengajar. Demikian juga dengan sarana dan prasarana, perpustakaan, serta laboratorium yang mestinya menjadi jantung pesantren ternyata belum cukup memadai.

Solusi Terhadap Manajemen Pembiayaan Operasioal Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syaatibi Bantoabaddo Gowa.

Dengan adanya pemaparan diatas dapat deiketahui beberapa penghambat yang menjadi masalah terhadap keuangan ataupun pengelolaan manajemen pembiayaan Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Saatibi Batoabaddo Gowa.

- 1) Perlu adanya peningkatan kerjasama yang lebih baik antara pihak pesntren dengan pemerintah dalam hal ini adalah dinas Pendidikan dan atau Departemen agama kabupate Gowa. Hal ini diharuskan karna bukan sekedar pertimbangan material namun lebih dari itu yakni dukungan pemerintah yang menjadi bekal moril pnglola sebagai pelaksana cita-cita luhur bangsa, turut mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa.
- 2) Perlu adanya *update system* pengelolana anggaran yang lebih trasparasi tidak hanya pada pembukuan dan papan tabulasi, namun mengaksesnya pada link atau situs resmi pondok pesantren. Hal ini diharuskan agar semakin menumbuhkan rasa percaya dari seluruh elemen lapisan masyarakat, tentu dengan mempertimbangkan hal-hal lain dalam batas kewajaran.
- 3) Perlu agar memanfaatkan unit usaha pesantren, pemanfaatan lahan kosong dalam bidang agrebisnis. Pemanfaatan satu tahun alumni sebagai bentuk pengabdian, yang mana ini semua justru menjadi solusi pembiayaan dan menghemat pembiayaan personalia (honor dan tunjangan) pengajar.

PENUTUP

Untuk dapat memberikan gambaran ringkas dan lugas, maka dalam sebuah penelitian perlu adanya kesimpulan hasil penelitian. Demikian halnya dengan hasil penelitian ini, berdasarkan pada pemaparan bab-bab sebelumnya, maka terkait penelitian ini yang berjudul *Majemen pemiayaan Operasional Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syaatibi Bantoabaddo gowa* berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pada manajemen Pembiayaan

1. Pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syaatibi Bantoabaddo gowa secara administratif telah menunjukkan tata kelola keuangan yang positif, bahkan cenderung sitematis meski masih terbilang manajemen pembukuan sangat sederhana. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerapan penganggaran sampai dengan pengawasan keuangan yang telah dibukukan secara rapi dan tertib. Selain itu, sisi operasionalisasi penggunaan keuangan pesantren baik yang berasal orang tua santri, maupun

pihak-pihak yang secara insidental memberikan bantuannya juga secara proporsional dialokasikan dengan mengacu pada penganggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Sistem pembiayaan pendidikan pesantren yang diawali dari penganggaran (*budgeting*) benar-benar ditentukan berdasar pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan menerapkan skala prioritas dalam dua jangka penggunaan; yaitu jangka pendek yang dinamakan kebutuhan personalia, dan jangka Panjang yang dikenal dengan kebutuhan non personalia. Sedangkan dalam pembukuannya pada pesantren tersebut menerapkan sistem pembiayaan pendidikan dua sisi, yaitu pembukuan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang nantinya akan disesuaikan dengan sumber dana Lembaga pemerintah tersebut, dan pembukuan yang bersifat internal (sumber dana dari orang tua santri ataupun pihak lain yang san tetapi tidak mengikat).
3. Pembukuan keuangan juga secara berkala dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan. Untuk pembukuan keuangan yang dilaksanakan secara rutin adalah pembukuan yang disebut buku bantu tunai berisi bukti bukti pengeluaran dan pembelanjaan yang sering terjadi.
4. Untuk pengawasan (*controlling*) Pesantren ini menerapkan elemen yang secara langsung dapat turut mengawasi jalannya pendapatan dan penggunaan keuangan.
 - a. Kepala pesantren (direktur) dan kepala yayasan sebagai kuasa pengguna anggaran juga secara terus menerus melakukan pengawasan dan perbaikan yang diperlukan baik yang bersifat administratif maupun operasional; baik berhubungan dengan pemerintah maupun berhubungan dengan orang tua santri dan pihak lain yang sah;
 - b. Komite pesantren yang secara berkala mendapatkan laporan dari kepala pesantren, sehingga komite pesantren dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terutama dalam hal operasional keuangan pesantren.

Pada faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung berjalannya sistem pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syaatibi Bantoabaddo gowa adalah sumber daya manusia yang ada di dalamnya secara komulatif memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan *teamwork* yang dibangun oleh seluruh elemen personalia yang ada juga nampak harmonis. Sehingga, untuk menjalankan seluruh yang terkait keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar. Terlebih utama adalah bendaharawan yang memiliki kemampuan bidang administrasi serta akuntansi sangat mendominasi tata kelola dan tata laksana keuangan pesantren.

Selain itu, kerjasama baik dengan masyarakat yang telah terjalin selama ini untuk lebih ditingkakan, agar segala persoalan yang bersifat *urgent* dapat diselesaikan dan segera dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Tingkat responsif masyarakat kategorinya cukup baik, hal ini nampak dari masukan-masukan yang membangun bagi jalannya roda penganggaran dan penggunaan keuangan pesantren.

Faktor penghambat dalam merealisasikan sistem pembiayaan pendidikan pada Pesantren pesantren ini adalah kurang bantuan dana dari pemerintah yang pada akhirnya juga berdampak pada responsifnya masyarakat (terutama orang tua santri dan pihak lain). Demikian juga halnya pengawasan oleh masyarakat ini belum dapat dijalankan secara maksimal, oleh karena sikap masyarakat yang masih sekedar mempercayakan segala keuangan yang diperoleh pesantren itu sendiri. Sehingga, ketidak-pahaman pada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan keuangan pesantren masih sering muncul (baik secara langsung maupun tidak langsung disampaikan kepada pihak pesantren).

Pada Solusi Manajemen Pembiayaan

Pihak pengelola harus menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan fungsional-fungsional yang ada di pemerintah, transparansi pengelolaan anggaran yang lebih terbuka, *update* laporan keuangan yang lebih baik serta pemanfaatan lahan kosong dalam bidang agribisnis dan pemanfaatan alumni selama setahun untuk meminimalisir pembiayaan personalia yang ada.

Dengan memperhatikan pembahasan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pejabat fungsional dalam hal ini adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Dinas Pendidikan Kabupaten agar segera memberikan dukungan dana hingga akhirnya bias menjalankan fungsi tugasnya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan pengawasan terkait perencanaan, pembukuan, serta monitoring terhadap keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Sumber keuangan yang rutin maupun insidental juga perlu terus dimonitoring secara berkesinambungan, agar pihak pesantren dapat menggunakan dan melaporkan keuangan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sistem manajemen keuangan pesantren yang secara administratif sudah berjalan dengan baik untuk dapat dipertahankan. Terutama penerapan administratif dan operasionalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yakni prinsip transparansi dan keterbukaan. Begitu juga daya dukung laporan penggunaan keuangan, baik yang memerlukan pajak maupun tidak tetap dipertahankan pengadministrasiannya.
- c. Kepala pesantren dan bendaharawan untuk lebih meningkatkan pengawasan yang terkait penggunaan keuangan masyarakat. Untuk itu, perlu

adanya langkah strategis untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan pesantren.

- d. Selain papan informasi keuangan yang dapat dilihat secara umum, maka jika diperlukan, maka pihak pesantren memuat hasil pelaporannya pada situs atau web resmi pesantren. Hal ini, bertujuan agar pengawasan penggunaan yang utamanya bersumber dari masyarakat akan lebih memacu daya semangat masyarakat memberikan daya dorong juga dukungannya demi keberlangsungan pesantren kedepan agar lebih berkembang.
- e. Memandang pergerakan dan perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi dewasa ini, maka pihak pesantren perlu menerapkan sistem informasi berbasis internet. Tujuan program berbasis teknologi informasi ini adalah untuk mendukung dan mendorong masyarakat secara luas mengetahui rancangan hingga penggunaan keuangan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Anaroga, Pandji Anaroga. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arifin, Miftahol. *Manajemen Keuangan Pendidikan*, Sumenep: Madura Press, 2013.
- Arikunto, Suhastimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Astuti. *Pengelolaan Manajemen keuangan pada Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Veteran Surakarta*, no.1 (2017), Vol 3.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Dempsey. *Riset Keperawatan Buku Ajar & Latihann*. Jakarta: EGC, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pondok Pesantren dan Pesantren Diniyah* Jakarta: DEPAG RI, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-undang RI No. 20, Pasal 55. Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. DEPDIKNAS, 2003.
- Direktorat Tenaga Kependidikan, *Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Pesantren*. DEPDIKNAS, 2007.

- Fatah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan*. Bandung: Rosda Karya, 2012.
- Fatah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Fatah, Nanang. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Andira, 2000.
- Fatah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Halim, Abdul. *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Harahap, Sofyan. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2001.
- Harsono, *Pengelolaan pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Irianto, Agus. *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jusuf, Kadarman. *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Martin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014.
- Masyhud Sulthon dan Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Utama, 1992.
- Masyhuri. *Problematika Pesantren*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana 2006.
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media Grup, 2010.

- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
- Sa’ud, Udin Syaifudin. *Pernecanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Saliman, Abdul Rahum. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta; Kencana Renada Media Grup, 2005.
- Saputra, Uhar Suhar. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudrajat, Akhmad. *Konsep dasar manajemen keuangan sekolah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Semarang: Widya Karya, 2011.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2004.
- Supriadi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Supriyadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin Press, 2014.